

AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN

ACCESS TO NATURAL RESOURCES ON POVERTY AND FOOD SECURITY

Sa'diyah El Adawiyah

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Kh.Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Tangerang Selatan, 15419, Indonesia
Email: sadiyah.eladawiyah@umj.ac.id

Agus Hermanto

Universitas Muhammadiyah Jakarta
Jl. Kh.Ahmad Dahlan Cirendeu Ciputat, Tangerang Selatan, 15419, Indonesia
Email: agushermanto2000@gmail.com

Wichita Yasya

Universitas Bhayangkara
Jl. Perjuangan No.81, RT.003/RW.002, Marga Mulya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat 17143, Indonesia
Email: dearwichi@gmail.com

Rina Kristanti

Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Gedung Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 6 Jakarta Pusat, Indonesia
Email: cumieinfahatan@gmail.com

Marlin Chrisye

Institut Pertanian Bogor
Jl. Raya Dramaga Kampus IPB Dramaga Bogor Jawa Barat 16680, Indonesia.
Email: marlinchrisye_wattimena@yahoo.com

Abstrak

Akses terhadap sumber daya alam dianggap berhubungan dengan tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan suatu komunitas masyarakat. Akses terhadap sumber daya alam khususnya yang bersifat milik bersama dan terbuka (*common property and open access*) seperti perairan, hutan dan perikanan, semakin terancam akibat pertumbuhan populasi yang tinggi sehingga meningkatkan permintaan terhadap sumber daya tersebut dan menimbulkan kelangkaan. Tulisan ini menganalisis: kondisi alam, tingkat pendidikan nelayan, pola kehidupan nelayan, pemasaran hasil tangkapan, dan program pemerintah yang belum memihak masyarakat miskin. Adapun teori yang digunakan ialah teori akses, ketahanan pangan, dan kemiskinan. Analisis kajian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Hasil pembahasan menemukan bahwa kemiskinan pada masyarakat nelayan memiliki ciri yang terdiri dari: 1) Faktor alam yang tidak menentu memberikan kontribusi dalam kemiskinan nelayan; 2) Tingkat pendidikan nelayan yang rendah mengakibatkan kesulitan dalam mengelola sumber daya alam, teknologi penangkapan ikan, dan pengolahannya; 3) Pola kehidupan nelayan yang cenderung boros dan sulit diubah menjadi penyebab faktor kemiskinan pada nelayan; 4) Pemasaran hasil tangkapan yang tidak memadai karena pengaruh iklim menyebabkan nelayan terjerat hutang pada tengkulak; dan 5) Program pemerintah yang

belum memihak masyarakat miskin. Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi.

Kata Kunci: akses, kemiskinan, ketahanan pangan.

Abstract

Access to natural resources is considered to be related to the level of poverty and food security of a community. Access to natural resources, especially common property and open access, such as waters, forests and fisheries, is increasingly threatened because high population growth escalates demand for these resources, which result in scarcity. This study analyzes: natural conditions, fishermen's education level, fishermen's life patterns, catches' marketing, and government programs that have not been in favor of the poor. The theory used is access, food security and poverty. The analysis of this study was conducted through a literature review. The results of the discussion found that poverty in fishing communities has characteristics consisting of: 1) Uncertain natural factors contribute to fishermen's poverty; 2) The low educational level of fishermen creates obstacles in managing natural resources, fishing technology, and fish processing; 3) Fishermen tend to have habits to be excessive in daily expense, it is difficult to change that it causes them to be poor; 4) Inadequate catch marketing system due to climate influences trapped fishermen in debt to middlemen; 5) Government programs have not taken sides with the poor. Hence, fishermen's poverty alleviation program requires a special strategy with capacity to answer the factual reality.

Keywords: access, poverty, food security.

PENDAHULUAN

Satu masalah terbesar di dunia adalah kemiskinan dan pangan yang menunjukkan gejala yang makin memburuk (Daryanto dan Hafizrianda, 2010; Tajerin, Sastrawidjaja & Yusuf, 2011). Pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah memprioritaskan program pangan dan gizi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Global Hunger Index (2019) Indonesia memerlukan penanganan yang khusus terutama kelaparan (Niko & Atem, 2020), sehingga fokus pemerintah saat ini adalah bagaimana mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat (Setiawan, 2010) sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui berbagai program, salah satunya bidang ekonomi (Aviliani, 2009; Tajerin, Sastrawidjaja & Yusuf, 2011).

Akses terhadap sumber daya alam dianggap berhubungan dengan tingkat

kemiskinan dan ketahanan pangan suatu komunitas masyarakat. Akses terhadap sumber daya alam khususnya yang bersifat milik bersama dan terbuka (*common property and open access*) seperti perairan, hutan dan perikanan, semakin terancam karena pertumbuhan populasi yang tinggi akibat meningkatnya permintaan terhadap sumber daya tersebut sehingga menjadi langka (Lee & Neves, 2009). Sifat akses terhadap sumber daya alam yang terbuka menimbulkan konflik tidak hanya pada level nilai produksi, tetapi juga nilai sosiokultural dan politis. Kompleksitas kontestasi akses terhadap sumber daya alam, seperti hutan, perairan, dan perikanan, menyebabkan penanggulangannya memerlukan pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan perspektif ilmu alam dan ilmu sosial.

Terdapat lima masalah pokok yang menjadi tujuan dari kajian terkait penyebab kemiskinan masyarakat nelayan, di antaranya: 1) Kondisi alam; 2) Tingkat pendidikan nelayan; 3)

Pola kehidupan nelayan; 4) Pemasaran hasil tangkapan; 5) Program pemerintah yang belum memihak masyarakat miskin.

Ketahanan Pangan dengan Akses terhadap Sumber Daya Alam

Suryana & Kariyasa (2008) menggambarkan perkembangan evolusi paradigma ketahanan pangan, di mana pada awalnya berfokus pada bagaimana pangan selalu tersedia (*food availability approach*). Paradigma ini kemudian berubah menjadi pendekatan perolehan pangan atau *food entitlement approach*, dan berkembang menuju konsep ketahanan pangan dengan fokus pada prinsip keberlanjutan (*sustainable food security*) dan gizi (*nutritional food security*). Pendekatan terkini yaitu pendekatan kedaulatan pangan (*food sovereignty*).

Menurut Maxwell (1996) dan Atem & Niko (2020) ada tiga perubahan penting dalam ketahanan pangan yaitu; 1) Adanya perubahan dari tingkat global dan nasional ke tingkat rumah tangga (*household*) dan individu (*individual*); 2) Perspektif pangan sebagai kebutuhan dasar (*food first perspective*) menjadi berubah ke perspektif kehidupan (*livelihood perspective*); 3) Perubahan indikator objektif (*objective indicators*) ke persepsi subjektif (*subjective perception*).

Pengertian ketahanan pangan di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, definisi ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Inti dalam ketahanan pangan adalah bagaimana seluruh lapisan

masyarakat secara merata dapat dengan mandiri memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas.

Sementara itu, ketahanan pangan ini terkait erat dengan kemiskinan. Organisasi nasional ataupun internasional yang bergerak di bidang pangan maupun para ahli pembangunan melihat ada keterkaitan erat antara kemiskinan dan ketidaktahanan pangan (Suryana & Kariyasa, 2008). Ketidaktahanan pangan (*food insecurity*) dalam rumahtangga menurun saat tingkat pendapatan rumahtangga meningkat. Terjaminnya akses terhadap pangan yang menjadi definisi ketahanan pangan akan berdampak pada upaya penurunan kemiskinan, sebaliknya, jika akses terhadap pangan menjadi terhambat maka dapat menyebabkan kemiskinan. Dengan kata lain, kemiskinan dan ketahanan pangan saling mempengaruhi dengan hubungan sebab-akibat di mana kemiskinan menyebabkan ketidaktahanan pangan dan berlaku pula sebaliknya. Kemiskinan dan ketahanan pangan erat kaitannya dengan akses terhadap sumber daya alam.

Kemiskinan merupakan fenomena yang secara global terjadi pada masyarakat pada level pedesaan yang mata pencahariannya bergantung pada bagaimana mereka memiliki akses terhadap sumber daya alam untuk mengelolanya sedemikian rupa demi kelangsungan hidup mereka (Lee dan Neves, 2009). Selain itu, akses sumber daya alam yang semakin terbatas karena faktor alamiah maupun manusia sendiri berdampak pada ketersediaan pangan yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan pada suatu masyarakat. Semakin besar suatu masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, memiliki akses dan ketersediaan terhadap sumber daya alam, maka jumlah kemiskinan akan semakin rendah (Hakim & Zuber, 2008).

Sedangkan menurut Mulyani, Ritung, & Las (2011), tantangan utama untuk mewujudkan ketahanan pangan dan energi nasional antara

lain adalah: 1) Degradasi sumber daya lahan dan kelangkaan sumber daya air; 2) Penciptaan dan konversi lahan subur; 3) Cekaman variabilitas dan perubahan iklim, dan 4) keterbatasan sumber daya lahan potensial/subur. Kesemuanya ini berkaitan dengan akses terhadap sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk dapat menjamin akses dan ketersediaan terhadap sumber daya alam agar dapat mengurangi kemiskinan dan mewujudkan ketahanan pangan, diperlukan suatu upaya pengelolaan sumber daya alam khususnya yang bersifat terbuka seperti hutan dan perairan yang berbasis pada komunikasi yang partisipatif.

Kemiskinan pada Nelayan

Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2007; Sabarisman; 2017). Menurut Nugroho (1995), kemiskinan nelayan tidak dapat diukur secara kuantitatif saja tetapi kualitatif juga, dan bersifat statis dan kompleks (Kusnadi & Suffatni, 2002; Wijaya & Fauzie, 2020). Sedangkan kemiskinan di Negara berkembang menurut Nurske (1907-1959) seperti lingkaran setan (*vicious circle of poverty*). Berdasarkan teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*), (Nurske, 1953, dalam Kattel, Kregel, & Reinert, 2009) kemiskinan pada nelayan disebabkan rendahnya pendapatan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hal ini, maka harus dicari akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan pada nelayan. Banyak aspek yang menyebabkan kemiskinan nelayan atau masyarakat pinggiran pantai, antara lain kebijakan pemerintah yang tidak memihak masyarakat miskin. Banyak kebijakan terkait penanggulangan kemiskinan bersifat *top down* dan selalu menjadikan masyarakat sebagai objek, bukan subjek (Sabarisman, 2017).

Ketergantungan nelayan pada musim sangat berpengaruh pada tingkat kesejahteraan mereka, kadang dalam beberapa minggu nelayan tidak dapat melaut dikarenakan musim yang tidak menentu. Sumber daya manusia yang rendah dengan peralatan yang sederhana dan jauh dari teknologi mempengaruhi cara nelayan menangkap ikan, serta kurangnya penguasaan teknologi menjadikan kualitas dan kuantitas tangkapan tidak mengalami kemajuan.



Gambar 1. Struktur Masalah Kemiskinan Nelayan
Sumber : (Nawastuti: 2018)

Kusnadi & Suffatni (2002) mengidentifikasi sebab-sebab pokok yang menimbulkan kemiskinan pada masyarakat nelayan:

1. Belum adanya kebijakan dan implementasi pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan yang terintegrasi atau terpadu di antara para pelaku pembangunan;
2. Mendorong pemerintah daerah merumuskan *blue print* kebijakan pembangunan kawasan pesisir dan masyarakat nelayan secara terpadu dan berkesinambungan;
3. Permasalahan isolasi geografis desa nelayan yang menyulitkan proses keluar masuk barang, jasa, kapital, dan manusia. Berimplikasi pada melambatnya dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat nelayan;
4. Keterbatasan modal usaha atau investasi sehingga menyulitkan

nelayan meningkatkan kegiatan ekonomi perikananannya;

5. Adanya relasi sosial ekonomi "eksploitatif" dengan pemilik perahu dan pedagang perantara (tengkulak) dalam kehidupan masyarakat nelayan;
6. Rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan, berdampak sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup; dan
7. Kesejahteraan sosial nelayan yang rendah sehingga mempengaruhi mobilitas sosial mereka.

Para pakar ekonomi sumber daya melihat kemiskinan masyarakat pesisir, khususnya nelayan, lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor sosial ekonomi yang terkait dengan karakteristik sumber daya serta teknologi yang digunakan. Berbagai faktor tersebut membuat nelayan tetap dalam kemiskinannya. Menurut Subade & Abdullah (1993), nelayan yang tetap memilih industri perikanan adalah mereka yang *opportunity cost*-nya rendah. Defenisi *opportunity cost* nelayan adalah kemungkinan atau alternatif kegiatan atau usaha ekonomi lain yang terbaik yang dapat diperoleh selain menangkap ikan. Dengan kata lain, *opportunity cost* adalah kemungkinan lain yang bisa dikerjakan nelayan bila saja mereka tidak menangkap ikan. Bila *opportunity cost* rendah, maka nelayan cenderung tetap menjadi nelayan meskipun usaha tersebut tidak lagi menguntungkan dan efisien.

Menurut Panayotou (1982) dan Muhammad (2019), nelayan tetap mau tinggal dalam kemiskinan karena kehendaknya untuk menjalani kehidupan tersebut (*preference for a particular way of life*). Panayotou (1982) dan Subade & Abdullah (1993) memberikan penekanan bahwa nelayan lebih senang dan memiliki kepuasan hidup yang bisa diperolehnya dari menangkap ikan, dan tidak semata-mata beorientasi pada peningkatan

pendapatan. Karena *way of life* tersebut, maka kemiskinan bukan masalah baginya. *Way of life* yang sudah berlaku *tersebut* sangat sukar diubah. Meskipun banyak orang lain yang memandang nelayan hidup dalam kemiskinan, namun bagi nelayan sebaliknya, bukan kemiskinan, dan bisa saja mereka merasa bahagia dengan kehidupan itu.

Sumber Daya Alam dan Masalah Kelautan dan Perikanan Indonesia di Mata Dunia

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat besar dan strategis (Fatmasari, 2016) untuk dikembangkan dan dimanfaatkan. Terdiri dari 7,7 juta Km²; 1,9 juta Km² berupa daratan, dan 5,8 juta Km² berupa laut. Indonesia memiliki zona eksklusif dengan luas 2,7 juta Km² sebagai pusat keanekaragaman hayati.

Ostrom dan Schlager (dalam Sari & Satria, 2011) membagi empat tipe hak dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu: 1) Hak akses (*access right*) adalah hak untuk memasuki wilayah sumber daya dengan batas-batas yang jelas, dan untuk menikmati manfaat nonekstraktif; 2) Hak pemanfaatan (*withdrawal right*) merupakan hak untuk memanfaatkan sumber daya; 3) Hak pengelolaan (*management right*) adalah hak untuk turut serta dalam pengelolaan sumber daya; 4) Hak eksklusif (*exclusion right*) adalah hak untuk menentukan siapa yang boleh memiliki hak akses dan bagaimana hak tersebut dialihkan ke pihak lain; dan 5) Hak pengalihan (*alienation right*) adalah hak untuk menjual atau menyewakan sebagian atau seluruh hak kolektif tersebut.

Di tengah banyaknya persoalan dan masalah di bidang kelautan yang belum terselesaikan, inisiatif dan gagasan besar dari Indonesia demi lestariannya laut dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan acara konferensi internasional bertajuk *World Ocean Conference* (WOC) dan *Coral Triangle Initiative Summit* (CTIS) yang digelar dari tanggal 11 sampai dengan 15 Mei 2009 di Manado,

Sulawesi Utara dihadiri perwakilan dari 121 negara.

Agenda pokok yang dibahas dalam WOC dan CTIS tersebut adalah: 1) Penentuan bentang laut (*sea scapes*) prioritas yang cukup luas untuk percontohan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk setiap negara peserta; 2) Pengembangan jejaring kawasan konservasi laut; 3) Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan pengelolaan sumber daya hayati laut; 4) Pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan kapasitas dan pelibatan sektor swasta; 5) Penyesuaian terukur terhadap perubahan iklim; dan 6) Memperbaiki status ancaman terhadap beberapa spesies laut.

Pentingnya WOC dan CTIS bagi Indonesia dan negara-negara peserta, juga dilatarbelakangi kurangnya kepedulian dunia internasional terhadap pelestarian laut dan pengelolaan kekayaan hayati. Selaku tuan rumah, diharapkan Indonesia dapat memegang peran penting dalam isu di bidang kelautan, sehingga posisi tawar dan eksistensi Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang keempat di dunia dapat meningkat (Kusnadi, 2009).

PEMBAHASAN

Nelayan, berdasarkan beberapa kajian (Mubyarto, 1998; Wahyono & Imron, 2001; Imron, 2003; Kusnadi & Suffatni, 2002), merupakan masyarakat yang tergolong miskin. Kemiskinan pada masyarakat pesisir nelayan disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan infrastruktur. Di samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi, teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros, menyebabkan posisi tawar masyarakat nelayan semakin lemah. Pada saat yang sama, kebijakan

pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.

Kondisi Alam

Permasalahan kemiskinan pada nelayan sangat kompleks sebab masyarakat nelayan hidup di alam yang keras dan tidak pasti (*uncertainty*) dalam menjalankan usahanya. Masa paceklik yang datang setiap tahun tidak dapat ditentukan lamanya sehingga masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle*). Tidak ada yang bisa dilakukan dalam menghadapi kondisi alam, karena alam tidak akan bisa dilawan. Hal yang bisa dilakukan dalam menghadapinya adalah apabila masyarakat nelayan memiliki penguasaan aspek informasi dalam hal cuaca dan lokasi.

Nelayan di berbagai wilayah membutuhkan dukungan yang konkrit dari berbagai pihak mengenai prediksi cuaca dan lokasi kemungkinan terjadinya cuaca ekstrim, sehingga resiko di laut dapat dihindari, dan alternatif wilayah tangkapan yang relatif aman didapatkan. Perlu adanya kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai perkiraan cuaca dalam jangka waktu yang bersifat menengah maupun panjang, sehingga nelayan di masing-masing daerah dapat memprediksikan kondisi cuaca. Sosialisasi mengenai perkembangan cuaca beserta prediksinya dapat melalui pertemuan kelompok nelayan. Pemberian informasi mengenai perkembangan cuaca beserta dasar prediksinya merupakan asupan berharga bagi masyarakat nelayan, karena selain mereka akan memahami ilmu kebaharian tradisional yang sifatnya turun temurun dan terus dilestarikan, mereka juga akan memahami dasar kondisi cuaca berdasarkan informasi berbasis pemanfaatan teknologi.

Tingkat Pendidikan Nelayan

Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus dengan teknologi yang dapat dihasilkan nelayan, dalam hal ini teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan perubahan kimiawi pada ikan (Suwiyadi, Sumardi, & Nugraheni, 2019). Teknologi pengawetan ikan yang baik sangat diperlukan. Fakta di lapangan, nelayan lebih banyak menggunakan cara yang tradisional untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan pengusahaan nelayan terhadap teknologi. Dukungan peningkatan pendidikan kepada nelayan, tidak semata nelayan sebagai kepala keluarga, tetapi juga nelayan dalam konteks keluarga.

Keterbatasan pengetahuan terkadang terjadi karena sifatnya turun temurun (Listyawati & Suryani, 2017) di mana orang tua tidak mengharuskan anaknya untuk melanjutkan sekolah. Rendahnya keluarga nelayan yang mengakses pendidikan dasar, formal maupun informal, harus ditingkatkan. Perlunya keterlibatan pemerintah dan pemangku kepentingan serta pihak lainnya dibutuhkan untuk menjadikan perbaikan akses pendidikan prioritas, misalnya dengan membangun fasilitas pendidikan di dekat pemukiman nelayan, formal maupun informal. Diharapkan dengan dibukanya akses sarana dan prasarana, kondisi pendidikan anak nelayan akan menjadi jauh lebih baik. Anak-anak nelayan dapat menikmati pendidikan bukan hanya pendidikan dasar, tetapi juga pendidikan menengah dan atas. Jika tingkat pendidikan dapat meningkat, nelayan akan dapat memanfaatkan teknologi juga perkembangan informasi lainnya.

Pola Kehidupan Nelayan

Pola kehidupan nelayan, merupakan perilaku sehari-hari dengan menghabiskan waktu serta uang (Ulfah, 2011). Adanya kesan negatif (*stereotype*) yang disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu berdasarkan beberapa hasil penelitian (Sabarisman, 2017) seperti boros dan malas. Menurut Purwanti (2019), nelayan memiliki gaya hidup yang tinggi dan sering dianggap menjadi penyebab kemiskinan nelayan. Pada dasarnya nelayan memiliki etos kerja yang tinggi (Kusnadi, 2009; Sabarisman, 2017). Sebagai contoh, mereka pergi subuh pulang siang, bahkan pada masa tertentu nelayan terpaksa harus beberapa hari di laut dan menjual ikan hasil tangkapan di laut langsung kepada para tengkulak yang menemui mereka di tengah laut, kemudian menyempatkan waktu pada waktu senggang untuk memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan budaya boros dan lupa akan kondisi ketika mengalami kesusahan.

Berbagai upaya dilakukan untuk merubah cara berpikir nelayan dan keluarganya, terutama mengenai kemampuan dalam mengelola keuangan disesuaikan dengan kondisi normal dan paceklik, selain mencari alternatif aktivitas di saat kondisi cuaca tidak menentu. Strategi adaptasi yang dilakukan melalui mobilisasi peran perempuan atau istri dan anak-anaknya untuk mencari nafkah. Keterlibatan perempuan dalam mencari nafkah untuk keluarga di wilayah pesisir atau desa-desa nelayan seperti di Muara Angke (Listiyandra, Anna, & Dhahiyat, 2016), tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (*the division of labour by sex*) yang berlaku pada masyarakat setempat.

Kaum perempuan, seperti perempuan nelayan di Muara Angke dan pesisir Jawa, akan terlibat penuh dalam berbagai kegiatan pranata sosial ekonomi (Sukari, 2002; Listiyandra, Anna, & Dhahiyat, 2016) yang telah mereka bentuk, misalnya kegiatan pengajian, arisan,

kegiatan yang berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga. Hadirnya pranata sosial tersebut merupakan strategi adaptasi masyarakat nelayan dalam menghadapi kesulitan hidup yang dihadapinya. Strategi adaptasi diartikan sebagai pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai dengan konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi dan ekologi, di mana penduduk miskin itu hidup.

Peran kaum perempuan nelayan tidak lagi berada hanya pada ranah domestik atau rumah tangga saja, tetapi telah memasuki ranah publik atau masyarakat luas. Beberapa kasus di Muara Angke (Listiyandra, Anna, & Dhahiyat, 2016), Cirebon (Djuwita, 2015), Madura (Mubyarto, 1984; Laila & Amanah, 2015), Desa Tompotana Takalar (Purwanti, 2019), Pacitan (Listiawaty & Suryani, 2017) dan beberapa daerah pesisir lainnya, baik di Pulau Jawa dan di luar Jawa, para perempuan dan anak-anak terlibat dalam mencari dan menambah penghasilan keluarga. Perempuan nelayan bahkan terpaksa menitipkan anak mereka yang masih kecil untuk dirawat oleh anaknya yang lebih tua atau tetangga yang tidak bekerja karena suaminya bukan nelayan, melainkan guru, pedagang, petani dan lain sebagainya. Sedangkan strategi adaptasi yang dilakukan nelayan laki-laki atau suami adalah diversifikasi pekerjaan untuk memperoleh sumber penghasilan baru (Menggala, 2016), seperti menjadi buruh di pasar, bertukang, dan bertani bagi nelayan di pedesaan.

Berkaitan dengan diversifikasi pekerjaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan, pemangku kepentingan diharapkan mampu mencarikan potensi baik kewilayahan, maupun keterampilan masyarakat nelayan. Sehingga terdapat diversifikasi yang lebih menguntungkan bagi nelayan, baik melalui pengembangan pariwisata setempat, pengolahan

hasil tangkapan laut menjadi makanan khas, hingga upaya budidaya ikan. Selain itu, perlu membangun jejaring di antara pemangku kepentingan berdasarkan kapasitas masing-masing. Misalnya lembaga swadaya masyarakat dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, pemerintah memberikan dukungan perizinan dan fasilitas, dan pengusaha memberikan bantuan modal. Melalui konsep ini, diharapkan kondisi paceklik, tidak akan terlalu besar dampaknya bagi masyarakat nelayan karena sudah terbentuk alternatif pekerjaan yang sama-sama menguntungkan.

Kondisi Alat Tangkap dan Pemasaran Hasil Tangkapan

Nelayan yang berada di daerah pesisir tidak selalu memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI). TPI yang seharusnya berfungsi sebagai tempat pelelangan ikan beralih fungsi sebagai pasar ikan, tanpa lelang seperti terjadi di Rembang, Cirebon, Muncar dan beberapa daerah lain di Pulau Jawa (Antariksa, Imron, & Indrawasih, 2002; Imron, 2003). Nelayan yang tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), terpaksa menjual hasil tangkapan mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran, sehingga nelayan tidak pernah untung. Keterbatasan infrastruktur menjadikan nelayan merugi, tidak seimbang antara biaya yang dikeluarkan untuk melaut, dengan keuntungan hasil jual, karena harga dipermainkan oleh tengkulak. Selain itu, kebudayaan nelayan yang berbahaya namun terabaikan adalah terjalannya relasi sosial ekonomi yang sifatnya eksploitatif dengan pemilik perahu dan pedagang perantara yang biasanya tengkulak dalam kehidupan masyarakat nelayan.

Sistem bagi hasil *fifty-fifty*, hasil tangkapan setelah dikurangi biaya operasi dibagi antara pemilik perahu dan nelayan yang terdiri dari beberapa nelayan dalam satu perahu, menjadi tidak adil. Ditambah lagi, nelayan harus

menanggung penggantian alat baru bila terjadi kerusakan. Nelayan di Muncar dengan perahu *slerek*-nya dan nelayan Rembang dengan *purse seine* (Antariksa, Imron, & Indrawasih, 2002; Imron, 2003). Jika terjadi kerusakan mesin atau jaring, anggota *slerek* yang akan menanggung setengah bagian dari harga jaring atau mesin yang harus diganti.

Di sisi lain, rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga nelayan berdampak pada sulitnya peningkatan skala usaha dan perbaikan kualitas hidup. Upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan kepemilikan lebih dari satu jenis alat tangkap agar bisa menangkap sepanjang musim, mengembangkan diversifikasi usaha berbasis bahan baku perikanan atau hasil budidaya perairan seperti rumput laut, memperluas kesempatan kerja sektor *off fishing*, dan melakukan transmigrasi nelayan pada wilayah lain yang masih memiliki potensi kelautan.

Namun yang menjadi masalah adalah tidak semua nelayan memiliki perahu sendiri. Nelayan yang tidak mempunyai modal untuk membeli perahu, terpaksa meminjam uang kepada tengkulak. Pada umumnya para tengkulak (*patron*) memberikan pinjaman jika hasil tangkapan nelayan (*client*) minimal. Ketergantungan nelayan pada tengkulak berawal dari utang atau pinjaman (Sabarisman, 2017), dan biasanya dilakukan pada saat paceklik atau saat memperbaiki kerusakan alat tangkap seperti jaring dan mengganti tali kajar. Meskipun demikian, ada juga pihak yang menilai bahwa keberadaan para tengkulak tersebut justru menolong nelayan. Kondisi ini terjadi karena negara tidak mampu memberikan pinjaman lunak. Sementara bank tidak mungkin diakses nelayan sebab alat tangkap, sebagai faktor produksi, tidak dapat dijadikan agunan.

Perspektif struktural kemiskinan nelayan tidak hanya disebabkan hubungan *patron-client*

yang menimbulkan jeratan utang dan mengarah pada bentuk eksploitasi. Tetapi kemiskinan nelayan juga terjadi karena keterbatasan akses nelayan terhadap hak penguasaan sumber daya perikanan. Penguasaan atas sumber daya perikanan selama ini lebih banyak dinikmati oleh kolaborasi pemilik modal dan birokrat.

Pola hubungan *patron-client* memungkinkan mereka berutang, baik digunakan pada tujuan yang baik maupun tidak semisal membeli suatu barang berharga di rumah. Sehingga tidak mengherankan jika nelayan berenang dalam kubangan utang. Namun berdasarkan pandangan nelayan sebagai perspektif *emic*, kuatnya pola *patron-client* di masyarakat nelayan disebabkan oleh kegiatan perikanan yang penuh resiko dan ketidakpastian, sehingga tidak ada pilihan lain bagi mereka selain bergantung pada pemilik modal (*patron*). Bisa dibayangkan apa yang akan diterima para nelayan dengan sistem yang demikian, sehingga sangatlah wajar jika kemiskinan menjadi bagian yang akrab dalam kehidupan mereka.

Program Pemerintah Tidak Memihak Nelayan

Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia perlu mendapat perhatian dari pemerintah, terutama berkaitan dengan hak kepemilikan sumber daya alam (Sari & Satria, 2011). Terdapat beberapa rezim kepemilikan sumber daya alam, yaitu rezim negara (*state property*), yaitu sumber daya alam yang dimiliki oleh seluruh warga negara dan pengalihan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah. Rezim swasta (*private property*), kepemilikan oleh individu atau perusahaan, dan rezim masyarakat (*communal property*) yaitu sumber daya alam yang dikontrol oleh sekelompok masyarakat. Sementara, akses terbuka (*open access*) adalah sumber daya alam dapat dimiliki semua orang (Sari & Satria, 2011).

Berkaitan dengan sumber daya alam dan kondisi kehidupan nelayan, pemerintah telah

menggulirkan berbagai macam program untuk menanggulangi kemiskinan pada nelayan. Program-program tersebut adalah pertama, program yang bersifat umum antara lain Program Instruksi Presiden Desa Tertinggal (IDT), Program Keluarga Sejahtera, Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Kedua, program khusus yang ditujukan untuk masyarakat nelayan yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PEMP) Desa Tanjung Pasir (Amanah & Farmayanti, 2011) dan Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK).

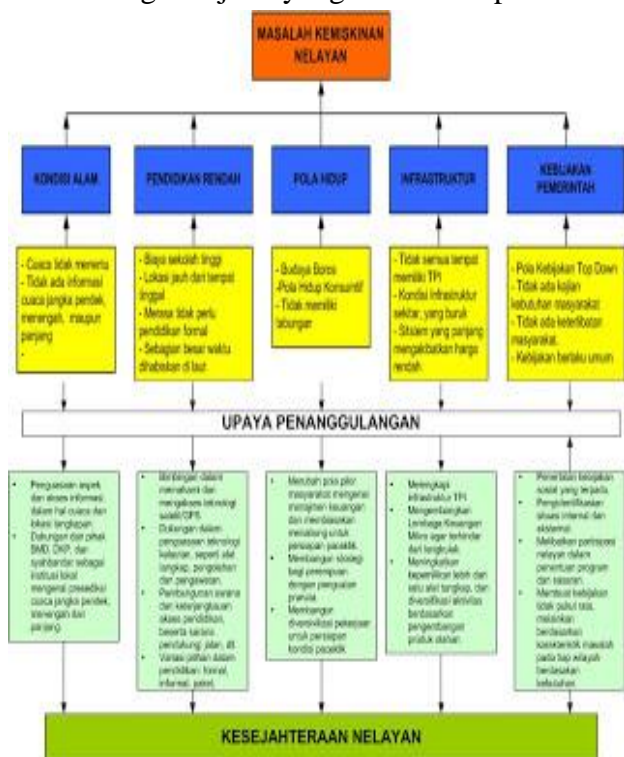
Menurut Rahmatullah (2010) program-program tersebut tidak membuat nasib nelayan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Formulasi kebijakan *top down* menjadi penyebab kurang berhasilnya program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan nelayan. Kebijakan *top down* memberikan solusi seragam terhadap permasalahan nelayan yang sangat beragam, kompleks, dan bersifat lokal. Sedangkan, pemerintah berupaya melakukan penanggulangan kemiskinan nelayan secara teknis hanya mengenai penangkapan perikanan. Sementara kemiskinan harus dipandang secara holistik karena permasalahan yang dihadapi sesungguhnya lebih kompleks bahkan semrawut.

Oleh karena itu, perlu suatu kebijakan sosial yang terkait/terpadu untuk menangani kemiskinan nelayan berdasarkan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan pemerintah. Adapun tujuan diterbitkan kebijakan ini adalah untuk menghilangkan keegoan dari masing-masing pemangku kepentingan. Kebijakan penanganan kemiskinan nelayan berisi: 1) Keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi di

internal pemerintah. Yang perlu digarisbawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan mampu ditangani secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan saja, melainkan seluruh pihak terkait; 2) Keterpaduan keahlian dan pengetahuan. Untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi dan program, harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian. Tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan; 3) Keterpaduan masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat komprehensif, dan tidak parsial; 4) Keterpaduan lokasi memudahkan pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan lintas sektor, sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Ketidakberhasilan penanganan kemiskinan nelayan selama ini selain karena kurangnya keterpaduan, juga adanya berbagai kelemahan dalam perencanaan. Proses perencanaan harus melibatkan unsur-unsur sebagai berikut (Menggala, 2016) Perumusan sasaran yang jelas, berupa hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta objek dari kegiatan: 2) Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan mempertimbangkan faktor internal sebagai kekuatan dan kelemahan, dan eksternal sebagai peluang dan ancaman. Tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan; 3) Penentuan tujuan harus bersifat spesifik dalam objek, kegiatan, dibatasi waktu, dan terukur, sehingga sasaran pengentasan kemiskinan nelayan dan jenis kegiatan yang akan dilakukan menjadi jelas, sehingga lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan

dengan jelas; 4) Menganalisis keadaan, pelaksanaan kegiatan harus disesuaikan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realitas yang ada di lapangan, dan apabila terjadi permasalahan di luar dugaan, maka perlu segera dibuatkan strategi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan; 5) Pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pendampingan harus dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai pasca kegiatan, sehingga akan menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Upaya Penanggulangan Kemiskinan Nelayan

Konsep tersebut akan dirumuskan dalam berbagai strategi pengentasan kemiskinan antara lain: pemberdayaan kelembagaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, perlindungan sosial, dan penataan kemitraan global.

Di samping itu ada kebijakan *pro-poor* (Korayem, 2004) dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Kebijakan atau program yang spesifik menargetkan penyebab-penyebab kemiskinan atau penerima manfaat, yaitu

kelompok miskin; 2) Kebijakan atau program meningkatkan kondisi kehidupan kelompok miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur pendukung perekonomian; 3) Kebijakan atau program yang menargetkan penurunan biaya hidup bagi kelompok miskin.

Pemerintah harus mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan ke arah yang lebih baik dengan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan seperti sumber daya manusia yang rendah, kondisi alam yang tidak menentu, regulasi yang tidak memihak serta rendahnya pemanfaatan teknologi melalui alternatif kebijakan, antara lain: mendorong pendirian dan penguatan koperasi nelayan, peningkatan penerapan teknologi sesuai dengan kondisi sosial budaya pada setiap daerah, penguatan kapasitas sumber daya manusia nelayan, pembentukan badan logistik perikanan, melakukan *review* dan perbaikan aturan perundang-undangan yang memberatkan nelayan kecil, melakukan evaluasi dan perbaikan program yang pendanaannya bersumber dari APBN, dan mendorong pemanfaatan dana desa yang difokuskan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui koperasi.

PENUTUP

Kemiskinan pada masyarakat nelayan memiliki ciri: 1) Faktor alam yang tidak menentu memberikan kontribusi dalam kemiskinan nelayan; 2) Tingkat pendidikan nelayan, keterbatasan pengetahuan karena pendidikan yang rendah sehingga nelayan kesulitan mengelola sumber daya alam, teknologi penangkapan ikan, serta pengolahannya; 3) Pola kehidupan nelayan yang cenderung boros menjadi budaya yang sulit diubah sebagai penyebab faktor kemiskinan pada nelayan; 4) Pemasaran hasil tangkapan yang tidak memadai karena pengaruh iklim menyebabkan nelayan terjatuh dalam hutang

pada tengkulak. Di samping itu juga, jauhnya tempat pelelangan ikan menjadi alasan nelayan terikat *patron-client* dengan tengkulak; 5) Program pemerintah yang belum memihak masyarakat miskin. Perlu strategi khusus untuk mengentaskan kemiskinan pada nelayan yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk menyejahterakan para nelayan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada mitra bestari yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan tulisan ini. Selain itu juga pada tim redaksi Jurnal Sosio Informa, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S. & Farmayanti, N. (2011). Strategi Pemberdayaan Nelayan Berbasis Keunikan Agroekosistem dan Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 16 (3), 223-229.
- Antariksa, I. G. P., Imron, M., & Indrawasih, R., (2002). Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Terpadu: Masyarakat Nelayan dan Negosiasi Kepentingan. *PMB-LIPI*.
- Atem, & Niko, N. (2020). Persoalan Kerawanan Pangan pada Masyarakat Miskin di Wilayah Perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2 (2), 94-104.
- Aviliani, E. (2009, 25 Okt). Ekonomi Bisa Enam Persen. *Republika*.
- Daryanto, A. & Hafizrianda, Y. (2010). *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah; Konsep dan Aplikasi*. IPB Press.
- Djuwita, D. (2015). Peran Perempuan Masyarakat Pesisir dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Nelayan di Desa Mertasinga. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7 (2), 144-155.
- Fatmasari, D. (2016). Analisis Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Al-Amwal*, 6 (1), 144-166.
- Hakim, L & Zuber. A. (2008). Dimensi Geografis dan Pengentasan Kemiskinan Pedesaan. *Media Ekonomi*, 17.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5 (1), 40 - 56.
- Kattel, R., Kregel, J. A., Reinert, E. S. (Eds.). (2009). *Ragnar Nurkse (1907-2007): Classical Development Economic and its Relevance for Today*. Anthem Press.
- Korayem, K. (2004). Pro-Poor Policies in Egypt: Identification and Assessment. *International Journal of Political Economy*, 32 (2).
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar-Ruzz Media.
- Kusnadi. (2010, Juli). Kebudayaan Masyarakat Nelayan. Ekspresi Budaya Masyarakat Nelayan Di Pantai Utara Jawa. Jelajah Budaya Tahun 2010, Yogyakarta. http://repositori.kemdikbud.go.id/1066/1/Budaya_Masyarakat_Nelayan-Kusnadi.pdf
- Kusnadi, Suffatni, R. (2002). *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKIS.
- Laila, N.E.N & Amanah, S. (2015). Strategi Nafkah Perempuan Nelayan Terhadap Pendapatan Keluarga (*Livelihood Strategy of Coastal Women to Fishermen Family Income*). *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 3(2), 159-168
- Lee, R. D. and Neves. B. *Rural Poverty and Natural Resources: Improving Access and Sustainable Management*. (No. 09-03). (2009, March). International Fund for

Agricultural Development.
<http://www.ifad.org/rural/rpr2008/background.htm>

- Listiyandra, K., Anna, Z., & Dhahiyat, Y. (2016). Kontribusi Wanita Nelayan dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan di Muara Angke Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 8 (2), 80-90.
- Listyawati, A., & Suryani. (2017). Dukungan Istri Nelayan dalam Perekonomian Keluarga. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41 (2), 145-156.
- Maxwell, S. (1996). Food Security: A Post-modern Perspective. *Food Policy*, 21 (2), 155-170. doi: 10.1016/0306-9192(95)00074-7.
- Menggala, S. (2016). Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan Cilincing. *The Indonesian Journal of Public Administration*, 3, 59-68. DOI: 10.52447/ijpa.v2i1.433.
- Mubyarto, 1998. *Menanggulangi Kemiskinan*. Yogyakarta: Adytia Media.
- Muhammad, E. V. (2019). Identifikasi Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut Pulau Sabu untuk Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kabupaten Sabu Raijua. *Partner*, 1, 44-57.
- Mulyani, A., Ritung, S., & Las, I. (2011). Potensi dan Ketersediaan Sumber daya Lahan untuk Mendukung Ketahanan Pangan. *Jurnal Litbang Pertanian*, 30 (2), 73-80.
- Panatoyou, T. *Management Concept for Small-scale Fisheries: Economic and Social Aspects*. (1992). FAO.
- Purwanti, R. (2019). Peran Nelayan Perempuan dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pesisir di Desa Tompotana Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. *Buletin Eboni*, 15 (2), 79-90. DOI: <https://doi.org/10.20886/buleboni.5156>
- Rahmatullah. (2010). *Menanggulangi Kemiskinan Nelayan*. <https://www.rahmatullah.net>. Diakses 22 Mei 2021 pukul 22.38.
- Sabarisman, M. (2017). Identifikasi dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir. *Jurnal Sosio Informa*, 3 (3), 216-235. DOI: <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707>
- Sari, Y. T. W., & Satria, A. (2011). Akses Nelayan Terhadap Sumber Daya Pesisir di Kawasan Pertambangan. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 5 (3), 311-324. <https://doi.org/10.22500/sodality.v5i3.9695>
- Setiawan, B. (2010). *Konsep dan Analisis Isu Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pesisir*. Pelatihan Metodologi Riset.
- Subade, R.F., & Abdullah, N. M. R. (1993). Are Fishers Profit Maximizers? The Case of Gillnetters in Negros Occidental and Iloilo, Philippines. *Asian Fisheries Science*, 6, 39-49.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama.
- Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Public*. Alfabeta Bandung.
- Sukari. (2002). Peranan Perempuan dalam Rumah Tangga Nelayan: Kasus di Desa Branta Pesisir, Tlanakan, Pamekasan Pulau Madura. *Jurnal Perpustakaan Digital Universitas Negeri Malang*.
- Suryana, A., & Kariyasa, K. (2008). Ekonomi Padi di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26 (1), 17-31. DOI: 10.21082/fae.v26n1.2008.17-31
- Suwiyadi, Sumardi, & Nugraheni. (2019). *Strategi Peningkatan Kesejahteraan*

Nelayan: Sebuah Kontribusi bagi Pengentasan Kemiskinan Prespektif pada Wilayah Pesisir di Jawa Tengah.
Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX.
Purwokerto.

- Tajerin, Sastrawidjaja, & Yusuf, R. (2011). Tingkat Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan Rumah tangga Nelayan Miskin: Studi Kasus di kelurahan Marunda Baru, DKI Jakarta dan Desa Tanjung Pasir, Banten. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 6 (1), 83-102. DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jsekp.v6i1.5757>
- Ulfah, W. (2011). Studi Deskriptif tentang Gaya Hidup Masyarakat Pesisir (Nelayan) Pantai Utara Blimbing Paciran-Lamongan. *Personifikasi*, 2 (2), 139-144.
- Wahyono, A. & Imron, I. (2001). *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan* (ed. 1). Media Pressindo.
- Wijaya, A. B., & Fauzie, A. (2020). Pemaknaan Hidup Nelayan. Analisis Makro dan Mikro pada kemiskinan Nelayan. *Indonesian Psychological Research* 2 (2), 96-108. DOI: <https://doi.org/10.29080/ipr.v2i2.259>